

PROFIL

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

2023

PROFIL
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang memiliki tugas dan fungsi membantu Pemerintah Daerah dalam pengembangan Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dalam Peraturan Daerah ini urusan Keluarga Berencana diintegrasikan dengan urusan Pemberdayaan Perempuan dalam satu lembaga.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan Tipe A dan terletak di Jl. S. Siswomiharjo No. 9 Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar. Email : bppkbkep.selayar@gmail.com , Tlp. (0414) 21195, dengan Titik Koordinat -6.11853, 120.46408. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai dinas yang melaksanakan kewenangan di bidangnya, diharapkan nantinya dapat mendampingi masyarakat terutama kelompok-kelompok perempuan untuk dapat menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar melalui pelayanan dengan program-program khusus yang dimilikinya.

Pengelolaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sangat diharapkan mampu menunjang Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk menjadi Daerah Kabupaten Kepulauan yang maju dan sejahtera dengan penduduk yang memiliki kualitas yang dapat diandalkan untuk pengelolaan sumber daya yang ada. Untuk itu diperlukan pengelolaan yang terstruktur dan terintegrasi dengan kegiatan pembangunan melalui perencanaan yang strategis untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi setiap saat agar tujuan dan sasaran program yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang diemban oleh Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.



Pengelolaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sangat diharapkan mampu menunjang Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk menjadi Daerah Kabupaten Kepulauan yang maju dan sejahtera dengan penduduk yang memiliki kualitas yang dapat diandalkan untuk pengelolaan sumber daya yang ada. Untuk itu diperlukan pengelolaan yang terstruktur dan terintegrasi dengan kegiatan pembangunan melalui perencanaan yang strategis untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi setiap saat agar tujuan dan sasaran program yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang diemban oleh Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk pelaksanaan tugasnya tertuang dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kepulauan Selayar melalui Sekretaris Daerah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk disampaikan kepada Bupati Kepulauan Selayar sebagai pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dengan menggunakan indikator kinerja yang terukur.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum dan pembangunan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan operasional di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan fungsional di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- c. Pelaksanaan koordinasi terhadap kelancaran kegiatan instansi pemerintah, swasta, lembaga sosial dan organisasi masyarakat di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;

- d. Pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, kesekretariatan, organisasi dan tata laksana kepegawaian, keuangan, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

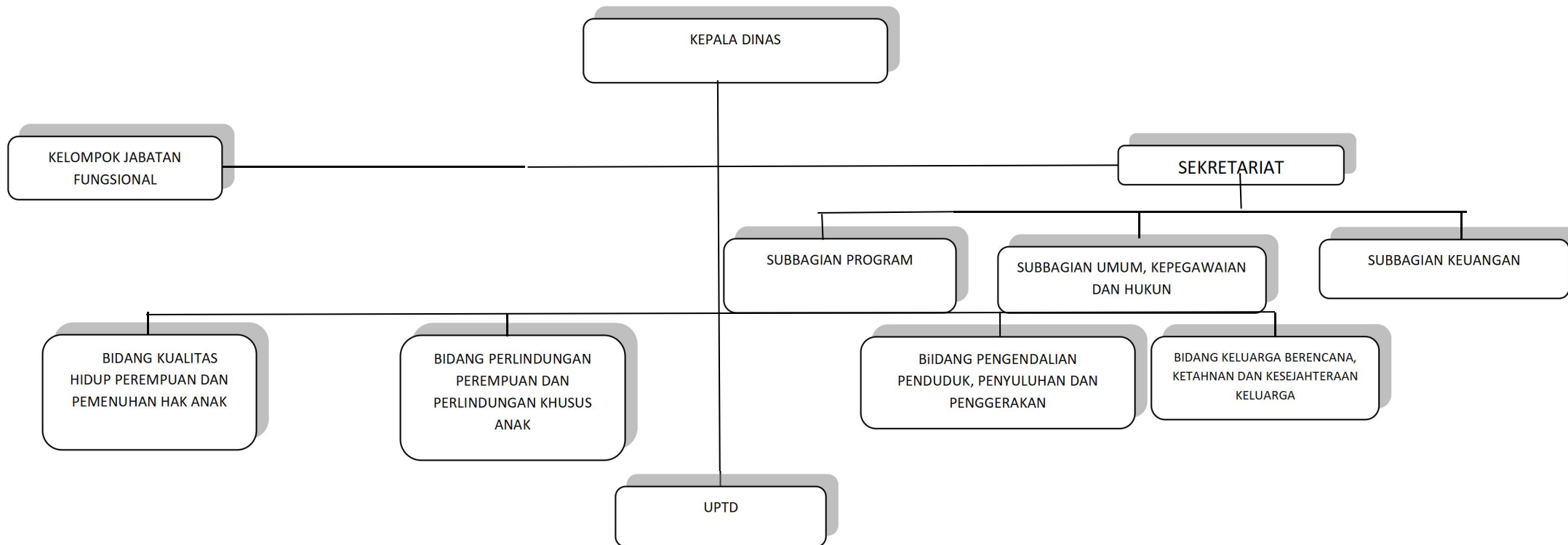
2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

- I. Kepala Dinas
- II. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Sub. Bagian Program
 - 2. Sub. Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum
 - 3. Sub. Bagian Keuangan.
- III. Bidang Peningkatan Kualitas Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
- IV. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
- V. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
- VI. Bidang KB, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- VII. UPTD
- VIII. Jabatan Fungsional.

Gambar 1.

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



4. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana didukung oleh 38 orang Pegawai Negeri Sipil dari berbagai latar belakang pendidikan. Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai dapat diklasifikasikan ke dalam 5 golongan, meliputi : SLTA, D-3, S-1 dan S-2 dan S-3.

a. Tabel 1.1. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan Ruang

No	Golongan	Jumlah (orang)
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2.	Pembina Tk.I (IV/b)	2
3	Pembina (IV/a)	3
3.	Penata Tingkat I (III/d)	12
4.	Penata (III/c)	0
5.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	2
6.	Penata Muda (III/a)	6
7.	Pengatur Tingkat I (II/d)	4
8.	Pengatur (II/c)	0
9.	Pengatur (II/b)	0
10.	Pengatur Muda(II/a)	0
JUMLAH		30

b. Tabel 1.2. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	S3	1
2.	S2	2
3.	S1	19
4.	D III	0
5.	SMA	8
JUMLAH		30

c. **Tabel 1.3. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Golongan	Jenis kelamin	
		Laki-laki	perempuan
1.	IV	1	5
2.	III	5	15
3.	II	2	2
JUMLAH		8	22

Penyuluh KB sebagai Pegawai Pusat Sebanyak 17 orang terdiri atas S1 4 orang, D3 1 orang, SMA 12 orang. Penyuluh PTT sebanyak 30 orang terdiri atas S1 5 orang, D3 1 orang dan SMA 24 orang. Staf PTT sebanyak 19 orang terdiri atas S1 12 orang, D3 1 orang dan SMA 6 orang.

DP3AP2KB mempunyai 2 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), yaitu UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) dan UPTD Pelayanan Kependudukan dan Keluarga Berencana adalah pelaksana koordinasi kegiatan operasional program DP3AP2KB Kabupaten Kepulauan Selayar di wilayah kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. UPTD Pelayanan Kependudukan dan Keluarga Berencana terdiri dari :

1. UPTD wilayah I : Kecamatan Bontomatene dan Buki
2. UPTD wilayah II : Kecamatan Bontomanai dan Benteng
3. UPTD wilayah III : Kecamatan Bontoharu dan Bontosikuyu

4. UPTD wilayah IV : Kecamatan Takabonerate
5. UPTD wilayah V : Kecamatan Pasimarannu
6. UPTD wilayah VI : Kecamatan Pasilambena
7. UPTD wilayah VII : Kecamatan Pasimasunggu dan Pasimasunggu Timur.

Visi dan Misi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih seharusnya menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Pedoman utama penyusunan visi kepala daerah (saat mencalonkan) adalah bagaimana menyesuaikannya dengan sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan lima tahun periode berkenaan. Untuk mencapai indikator dan target dari sasaran pokok yang sama, kepemimpinan yang berbeda dapat menghasilkan visi dan misi yang berbeda pula tergantung tekanan dan prioritas pembangunan masing-masing. Dengan demikian maka kedudukan RPJMD sangat penting untuk dijadikan landasan penyusunan dokumen RENSTRA SKPD yang dapat dioperasionalkan secara efektif dan efisien untuk

mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan.

Mengacu pada uraian di atas serta memperhatikan arah kebijakan tahun ketiga dalam RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025 Selayar, RPJPD dan RPJM Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018, substansi RPJM Nasional 2015-2019, dinamika lingkungan strategis, aspirasi masyarakat dan pemerintah Kepulauan Selayar, serta visi misi Bupati/Wakil Bupati, maka ditetapkan Visi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam RPJMD 2016-2021 sebagai gambaran realitas masa depan yang ingin dituju dalam kurun waktu 5 tahun ke depan adalah :

**“Terwujudnya Masyarakat Maritim yang Sejahtera Berbasis
Nilai Keagamaan dan Kultural”**

Dalam rumusan visi ini terdapat 3 (tiga) pokok visi yakni “masyarakat maritim sejahtera”, “nilai keagamaan” dan “nilai kultural”. “Masyarakat maritim yang sejahtera” adalah perwujudan visi yang hendak dicapai, “nilai keagamaan” dan “nilai kultural” adalah landasan nilai yang dijadikan acuan dalam pencapaian perwujudan visi kesejahteraan.

Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Oleh

karena itu, pernyataan misi sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan.

Misi ini berfokus pada strategi kebudayaan dalam melestarikan tradisi dan kearifan lokal daerah Kepulauan Selayar. Di dalamnya tercakup upaya pelestarian tradisi, pembinaan sejarah local dan penguatan lembaga adat; pembinaan kesenian daerah; serta pengelolaan cagar budaya dan museum.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, DP3AP2KB mendukung pencapaian misi ke-1, misi ke-2 dan misi ke-3. **Misi ke-1** : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan. Tujuan 1 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah, sasaran 1 : Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pelayanan, yaitu Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

Misi ke-2 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan, tujuan 2 : Meningkatkan Kapasitas dan Fasilitas Perdesaan, sasaran 3 : Meningkatnya Kapasitas SDM dan Fasilitas Perekonomian Perdesaan, yaitu Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS). **Misi ke-3** : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat, tujuan 3 : Meningkatnya Fasilitas Pembangunan Sumber Daya Manusia,

Sasaran 4 : Meningkatnya Pemenuhan Dasar Masyarakat, yaitu Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, maka ditetapkan beberapa tujuan antara lain :

- a. Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui pelebagaan keluarga kecil bahagia sejahtera
- b. Mewujudkan ketahanan kesejahteraan keluarga melalui pelayanan Keluarga Berencana
- c. Mewujudkan kesetaraan gender dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

- . **Jumlah Aparatur Sipil Negara, Data Jabatan Struktural, Data Jabatan Fungsional, Jumlah Tenaga Kontrak dan Jabatan Struktural yang belum Terisi.**

1. Jumlah Aparatur Sipil Negara

Tabel. Jumlah Aparatur Sipil Negara

Jabatan	Struktural	Fungsional	Ket.
Eselon II/a	0 orang		
Eselon II/B	1 orang		
Eselon III/A	1 orang		
Eselon III/B	4 orang		
Eselon IV/A	6 orang		
Eselon IV/B	1 orang		
Fungsional		5 orang	
		17 Orang Pegawai Pusat	Penyuluh Keluarga Berencana (KB)
		8 Orang P3K Pegawai Pusat	Penyuluh Keluarga Berencana (KB)

Pelaksana	12 orang		
Jumlah	25	30	

2. Data Jabatan Struktural

Tabel. Jabatan Struktural

No.	Nama	Jabatan	KET.
1	Drs. ANDI MASSAILE Nip. 19650806 199402 1 003	Kepala Dinas DP3AP2KB	
2	Hj. ANDI REZKY ANGRIANY, S.Pd.,M.M. Nip. 19750426 200003 2 009	Sekertaris Dinas DP3AP2KB	
3	MARLINA ,SE Nip. 19670817 200003 2 006	Kepala Bidang Dalduk, Penyuluhan dan Penggerakan	
4	UTAMI REZKI, SH Nip. 19720118 2000604 2 016	Kabid. KB, Ketahanan & Kesejahteraan Keluarga	
5	ANDI IRMAYANI, SP Nip. 19851028 200803 2 002	Kabid. Perlindungan Perempuan & Perlindungan Khusus Anak	
6	NURFACHRIANSYAH ILYAS, SKM.,M.Kes Nip. 19840602 201101 1 014	Kabid. Kualitas Hidup Perempuan & Pemenuhan Hak Anak	
7	Dra. SITTI NURSIAH Nip. 19690812 200701 2 036	Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum	

8	NUR MAYASARI, S.Pt Nip. 19801128 201001 2 006	Kepala Sub. Bagian Program	
9	ANDI HAMDANA, SE Nip. 19690403 199303 2 010	Kepala Sub. Bagian Keuangan	
10	ILHAM, S.Pd.I Nip. 19661104 198603 1 006	Kepala UPT Wilayah III	
11	M. TAHIR, S.IP Nip. 19740705 200701 1 050	Kepala UPT Wilayah II	
12	Hj. NURHADI MANDAI, S.Pd Nip. 19660504 198603 2 015	Kepala UPT Wilayah IV	
13	YUSRIADI, SE Nip. 19801106 201001 1 003	Kepala UPT Wilayah VII	
14	KAMIRUDDIN Nip. 19770815 200906 1 001	Pengelola Kepegawaian	
15	GAZALI Nip. 19730608 200906 1 001	Pengadministrasi Kepegawaian	
16	BAHTIAR, A.Md Nip. 19730307 201502 1 001	Pengelola Kepegawaian UPTD PK & KB Wilayah V	

3. Data Jabatan Fungsional

Tabel. 1. Jabatan Fungsional

No.	Nama	Jabatan Fungsional	KET.
1	SUHARMIYANI, S.STP Nip. 19911107 201206 2 001	Fungsional Analisis Kebijakan	
2	Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Muda Dr. NURSIAH, S.Ag., M.Si Nip. 19700609 200604 2 013	Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Muda	
3	ISNAWATI, S.Sos Nip. 19740729 200604 2 019	Fungsional Pekerja Sosial Muda	
4	IRNAWATI, S.Pi Nip. 19831019 201101 2 012	Fungsional Analisis Kebijakan	
5	ANDI OPU, SE Nip. 19740104 200701 2 015	Fungsional Penata Kependudukan & KB Muda	
6	ANDI SOFIYANTI, S.Ag Nip. 19770308 201101 2 008	Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Benteng	Pegawai Pusat
7	DARMAWATI, SH Nip. 19730314 201407 2 003	Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Bontoharu	Pegawai Pusat

8	M. TABRIS. S Nip. 19660810 198803 1 015	Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Bontomanai	Pegawai Pusat
9	NURNIAH. M, AMKL Nip. 19730405 200604 2 024	Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Pasimasunggu	Pegawai Pusat
10	ROSDIANA, S.Ag Nip. 19730117 201101 2 001	Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Bontomate'ne	Pegawai Pusat
11	SUWARSI NOVIANTI, SE Nip. 19800307 201407 2 003	Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Bontoharu	Pegawai Pusat
12	AMBO RAPPE. M Nip. 19760912 201001 1 012	Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana Kec. Pastim	Pegawai Pusat
13	ANDI TAWAKKAL Nip. 19820621 201410 1 001	Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Bontomate'ne	Pegawai Pusat
14	ASMARANI Nip. 19721219 201407 2 003	Penyuluh Keluarga Berencana Kec, Bontomanai	Pegawai Pusat

15	BAHYANI Nip. 19700109 201212 2 001	Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Bontomate'ne	Pegawai Pusat
16	Hj. NURHAYATI Nip. 19660620 201212 2 002	Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Taka Bonerate	Pegawai Pusat
17	MUHAMMAD ANSAR Nip. 19740702 201407 1 003	Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Benteng	Pegawai Pusat
18	NASMAWATI Nip. 19701008 201407 2 001	Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Pasimasunggu	Pegawai Pusat
19	NURDIN Nip. 19670211 200701 1 018	Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Pasilambena	Pegawai Pusat
20	RAHMIATI Nip. 19820329 200801 2 021	Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Benteng	Pegawai Pusat
21	SUPARMAN, SP Nip. 19800130 201502 1 001	Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Bontosikuyu	Pegawai Pusat
22	Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Bontomate'ne	Penyuluh	Pegawai

	SURYANI Nip. 19680513 201410 2 002	Keluarga Berencana Kec. Bontomate'ne	Pusat
--	---	--	-------

Tabel. 2. Jabatan Fungsional Umum Pelaksana

No.	Nama	Jabatan Fungsional	KET.
1	RISNAWATI. DP, S.IP Nip. 19840511 201407 2003	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	
2	Hj. NURNIATI. A Nip. 19700425 199003 2 006	Pengadministrasi Umum	
3	SITTI NURAENI Nip. 19680303 199103 2 019	Pengadministrasi Umum	
4	HUSNI LAEGO, S.Sos Nip. 19880122 202203 2 002	Analisis Advokasi & Komunikasi, Informasi & Edukasi	
5	SILVY SUTRI INSANI ASIS, S.Sos Nip. 19970307 202203 2 009	Analisis Perlindungan Perempuan	
6	NURSYAMSI, S.Sos Nip. 19980411 202203 2 011	Analisis Perlindungan Perempuan	
7	SABARIAH Nip. 19670102 200604 2 017	Pengadministrasi Keuangan	
8	HARTATI Nip. 19690204 200906 2 001	Pengadministrasi Keuangan	

9	SYAMSIRAWATI Nip. 19830710 200903 2 003	Pengadministrasi Kepegawaian	
---	--	---------------------------------	--

Tabel. 2. P3K PENYULUH KB PUSAT

No.	Nama	Jabatan	KET.
1	JUMRAWATI, S.Sos Nip. 197205172022212001	PKB Ahli Pertama	
2	SABDA ALAM, SKM Nip. 199104202022211002	PKB Ahli Pertama	
3	MUSLIADI, S.E Nip. 199102242022211003	PKB Ahli Pertama	
4	ANDI TAZKIR SAIFUL, S.Pd Nip. 198207012022211001	PKB Ahli Pertama	
5	SULASTRI, S.IP Nip. 199103312022212001	PKB Ahli Pertama	
6	ANDI ULFAWATI REZKI, A.Md.Keb Nip. 199201032022212008	PKB Terampil	
7	WIWI APRIANI, A.Md.Keb. Nip. 199404102022212005	PKB Terampil	
8	ANDI GUNAWAN, ST Nip. 198707312023211018	PKB Ahli Pertama	

4. Jumlah Tenaga Kontrak / Pekerja Harian Lepas (PHL)

No.	Nama	Jabatan	KET.
1	ISRAWATI IDRIS, SP	PHL	
2	ITA SAHARA, SE	PHL	
3	JUMRIATI, SE	PHL	
4	FAJRIANI, SE	PHL	
5	NUR NENENG SAFITRI, S.Pd	PHL	
6	NELLY HAMDANA, S.Sos	PHL	
7	SITTI AISAH	PHL	
8	KASMIATI, S.A.P	PHL	
9	RIDAWATI, A.Md	PHL	
10	MUHAMMAD IKBAL, S.Pd	PHL	
11	NUR MAYA	PHL	Lulus P3K Pusat / Penyuluh KB
12	FITRIANI	PHL	
13	RESTIA YULIANA, S.A.P	PHL	
14	SRI WAHYUNI. S	PHL	
15	HUJRANA. R,S.Pd	PHL	
16	BASNIA, S.A.P	PHL	
17	DESY SELFIANI, SKM	PHL	
18	RISKA ASTRIWANA KARIM	PHL	

19	DESI YULIANA PUTRI	PHL	
20	IRWAN SAPUTRA	PHL	
21	SATRIANI, S.Pd	PHL/ PENYULUH KB	
22	NUR INSANA, S.Kep. NS	PHL/ PENYULUH KB	
23	NUR RAHMAN HASFAR, S. Sos	PHL/ PENYULUH KB	
24	SULFIANI, S.M	PHL/ PENYULUH KB	
25	HASMIATI, S.M	PHL/ PENYULUH KB	
26	ANUGRAH PUTRA, S.Kom	PHL/ PENYULUH KB	
27	CITRAWATI	PHL/ PENYULUH KB	
28	TALLASIANG	PHL/ PENYULUH KB	Lulus P3K Pusat / Penyuluh KB
29	NOFALIA	PHL/ PENYULUH KB	
30	NIRMAWATI	PHL/ PENYULUH KB	Lulus P3K Pusat / Penyuluh KB
31	DARMAWATI	PHL/ PENYULUH KB	
32	ERMI SAHARA	PHL/ PENYULUH KB	Lulus P3K Pusat / Penyuluh
33	SELVA ATRIANI KALSUM SUDMAYADI	PHL/ PENYULUH KB	Lulus P3K Pusat / Penyuluh
34	ISNAWATI	PHL/ PENYULUH KB	Lulus P3K Pusat / Penyuluh
35	PEDI KRISTAL FIKRAM	PHL/ PENYULUH KB	
36	NURHAERANI	PHL/ PENYULUH KB	Lulus P3K Pusat / Penyuluh
37	ROSNANI NINGSI	PHL/ PENYULUH KB	
38	NIRWANA	PHL/ PENYULUH KB	

39	NUR ABIDIN JAMAL	PHL/ PENYULUH KB	
40	NURMUFIDAH	PHL/ PENYULUH KB	
41	SITTI HUBAYA	PHL/ PENYULUH KB	Lulus P3K Pusat / Penyuluh
42	ROSMIDA	PHL/ PENYULUH KB	
43	ANDI ZULFIANA	PHL/ PENYULUH KB	
44	MUSDALIFAH	PHL/ PENYULUH KB	
45	BAU NARRU	PHL/ PENYULUH KB	
46	NASRULLAH	PHL/ PENYULUH KB	

5. Jabatan yang Belum Terisi

No.	Nama Jabatan	Jumlah	KET.
1	Sub. Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum		
1	Operator Layanan Operasional	1	
2	Sub. Bagian Program		
1	Penelaah Teknis Kebijakan	1	
2	Pengolah Data dan Informasi	1	
3	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	1	
3	Kepala Sub Bagian Keuangan		
1	Operator Layanan Operasional	1	
	Bendahara		
	Pengelola Gaji	1	

4	Bidang Pemberdayaan Perempuan		
	Pengadministrasi Perkantoran	1	
5	Bidang Perlindungan Anak		
1	Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	
2	Pengadministrasi Perkantoran	1	
6	Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		
1	Penelaah Teknis Kebijakan	1	
2	Pengadministrasi Perkantoran	1	

6. Jabatan Fungsional yang Belum Terisi

No.	Nama Jabatan Fungsional	Jumlah	KET.
1	Bidang Pemberdayaan Perempuan		
	Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Muda	2	
2	Bidang Perlindungan Anak		
	Fungsional Pekerja Sosial Muda	2	
3	Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan		
	Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Muda	2	

4	Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		
	Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Muda	3	

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.1. CAPAIAN KINERJA URUSAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN IKK KELUARAN/OUTPUT TAHUN 2023

No.	Urusan Pemerintah	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
1							
		289	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG ----- x 100% Jumlah Lembaga pemerintah yg sudah dilatih PUG	-	-	Bid. Pemberdayaan Perempuan	Tidak di Anggarkan
		290	Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota ----- x 100% Jumlah Perangkat Daerah yg sudah dievaluasi melalui analisis gender	-	-	Bid. Pemberdayaan Perempuan	Tidak di Anggarkan
		291	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	Jumlah Media Massa	4	Bid. PA	
		292	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	-	-	Bid. Perlindungan Anak	Belum ada Layanan Anak yang memiliki SPM di Kab. Kep. Selayar
		293	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani ----- x 100% Jumlah Korban kekerasan anak ditingkat provinsi	(12 x 100%) 12	100%	Bid. PA	
		294	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	Jumlah Layanan Anak 7 Lembaga	7	Bid. Perlindungan Anak	
		295	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota	-	-		Dinas Sosial

No.	Urusan Pemerintah	Indikator Kinerja Kunci		Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
			(APBD kab/kota)					
		296	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang Perempuan Tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	$\frac{\text{Jumlah ormas pr yang sudah dilatih}}{\text{Jumlah seluruh ormas yang ada}} \times 100\%$	-	-	Bid. Pemberdayaan Perempuan	Tidak di Anggarkan
		297	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	$\frac{\text{Jumlah kader pr yang sudah dilatih}}{\text{Jumlah seluruh kader pr}} \times 100\%$	-	-	Bid. Pemberdayaan Perempuan	Tidak di Anggarkan
		298	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	$\frac{\text{Jumlah lembaga layanan PP yg sudah dilatih}}{\text{Jumlah seluruh lembaga layanan yg aktif}} \times 100\%$	-	-	Bid. PP	Tidak di Anggarkan
		299	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota		1. P2TP2A 2. PUSPAGA	2	Bid. Pemberdayaan Perempuan	
		300	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi		-	-	-	Belum ada kebijakan
		301	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi		-	-	-	Blm ada lembaga di Kep. selayar
		302	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	$\frac{\text{Jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan}}{\text{Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan}} \times 100\%$	$\frac{10}{10} \times 100\%$	100%		
2.								
		336	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	-	1 Dok	1	Bid. KB	
		337	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	-		≥ 20	Bid. Dalduk	
		338	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	$\frac{\text{Jumlah Kelahiran Remaja Kelompok Umur 15-19 Tahun}}{\text{Tahun}} \times 100\%$	$\frac{4.405}{13245} \times 100\%$	33,25	Bid. Dalduk	

No.	Urusan Pemerintah	Indikator Kinerja Kunci		Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
				Jumlah kelompok umur 15 – 19				
		339	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	$\frac{\text{Jumlah Masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi \& KIE)}}{\text{Jumlah sasaran masyarakat program KKBPK (advokasi KIE)}} \times 100\%$	$\frac{15.222}{12.997} \times 100\%$	1,171%	Bid. Dalduk	
		340	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	$\frac{\text{Jumlah stakeholder \& mitra kerja yang berperan aktif dalam pengelolaan program KKBPK}}{\text{Jumlah sasaran stakeholder pemangku kepentingan \& mitra kerja}} \times 100\%$	$\frac{21}{9} \times 100\%$	2,33%	Bid. Dalduk	
		341	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	$\frac{\text{Jumlah faskes yang siap melayani KB MKJP}}{\text{Jumlah Faskes}} \times 100\%$	$\frac{17}{17} \times 100\%$	100%	Bid. Dalduk	
		342	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	$\frac{\text{Jumlah MKJP}}{\text{Jumlah PUS}} \times 100\%$	$\frac{3.901}{13.422} \times 100\%$	29,06	Bid. Dalduk	
		343	Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif		Pokja Kampung KB	88	Bid. Dalduk	
		344	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	$\frac{\text{Jumlah Peserta KB Persalinan menurut metode kontrasepsi cara moderen}}{\text{Jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan}} \times 100\%$	$\frac{1.690}{2.643} \times 100\%$	63,94	Bid. Dalduk	Siga
		345	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah		$\frac{80}{13.422} \times 100\%$	0,059	Bid. Dalduk	Siga
		346	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	$\frac{\text{Jumlah Peserta KB pada keluarga penerima PBI}}{\text{Jumlah Keluarga PBI}} \times 100\%$	$\frac{8.655}{10.233} \times 100\%$	84,57	Bid. Dalduk	Siga

2.2 . Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil/Output

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
		47	Persentase ARGH pada Belanja Langsung APBD ----- x 100% Jumlah Seluruh Belanja Langsung APBD	$\frac{901313110529}{1136008538012} \times 100\%$	0,543	PP	
		48	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi ----- x 100% Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)	$\frac{12}{40450} \times 100\%$	0,00029	Bid. Perlindungan Anak	
		49	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) ----- x 100.000 Jumlah penduduk Perempuan	$\frac{10}{72193} \times 100.000\%$	0,00013	PP	
2	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
		66	TFR (Angka Kelahiran Total)		1,9	Bid. Dalduk	
		67	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) ----- x 100% Jumlah Pasangan Usia Subur	$\frac{13422}{20345} \times 100\%$	65,97	Siga 2023	PUS Peserta KB Modern & Tradisional
		68	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) ----- x 100% Jumlah Pasangan Usia Subur	$\frac{2611}{20534} \times 100\%$	12,71	Siga 2023	PUS bukan Peserta KB

**DATA PENGUKURAN SASARAN BALITA DENGAN STATUS GIZI TINGGI BADAN MENURUT UMUR
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR PERIODE BULAN AGUSTUS TAHUN 2023**

NO.	KECAMATAN	PUSKESMAS	DESA/KELURAHAN	BALITA			BALITA STUNTING		
				SASARAN	TERUKUR	TDK TERUKUR	JMLH	% (Terukur)	% (Sasaran)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bontomate'ne	Parangia	Bungaiya	74	66	8	19	28.79	89.19
			Pamatata	32	31	1	8	25.81	96.88
			Kayu Bauk	30	28	2	6	21.43	93.33
			Tanete	89	78	11	15	19.23	87.64
			Menara Indah	30	30	0	9	30.00	100.00
	Total			255	233	22	57	24.46	91.37
	Bontomate'ne	Bontomatene	Onto	62	54	8	16	29.63	87.10
			Bontona Saluk	60	49	11	12	20.00	79.03
			Barat Lambongan	51	47	4	11	21.57	92.16
			Tamalanrea	43	40	3	4	9.30	93.02
			Batangmata	54	42	12	6	11.11	77.78
			Batangmata Sapo	39	33	6	12	30.77	84.62
			Maharayya	47	42	5	15	31.91	89.36
	Total			356	307	49	76	24.76	86.24
2	Buki	Buki	Buki	36	34	2	6	17.65	94.44
			Lalang Bata	55	45	10	6	13.33	81.82
			Balang Butung	39	35	4	6	17.14	89.74
			Buki Timur	41	40	1	10	25.00	97.56
			Bontolempangan	60	51	9	7	13.73	85.00
			Mekar Indah	68	64	4	12	18.75	94.12
			Kohala	46	42	4	5	11.90	91.30
	Total			345	311	34	52	16.72	90.14
3	Bontomanai	Barugaia	Barugaia	77	70	7	16	22.86	90.91
			Jambuaia	74	70	4	11	15.71	94.59
			Bonea Timur	85	75	10	27	36.00	88.24
			Parak	156	146	10	31	21.23	93.59
			Bontomarannu	92	81	11	18	22.22	88.04
	Total			484	442	42	103	23.30	91.32
	Bontomanai	Polebunging	Polebunging	64	61	3	15	24.59	95.31
			Bonea Makmur	61	54	7	21	38.89	88.52
			Kaburu	50	47	3	11	23.40	94.00
			Bontokoraang	28	25	3	7	28.00	89.29
			Mare-mare	58	51	7	12	23.53	87.93
	Total			261	238	23	66	27.73	91.19
4	Benteng	Benteng	Benteng	737	708	29	74	10.45	96.07
			Benteng Utara	396	344	52	46	13.37	86.87
			Benteng Selatan	688	649	39	85	13.10	94.33
			Putabangun	141	135	6	23	17.04	95.74
			Bontolebang	63	56	7	11	19.64	88.89
	Total			2025	1892	133	239	12.63	93.43
5	Bontoharu	Bontosunggu	Bontosunggu	136	136	0	38	27.94	100.00
			Bontotangga	110	110	0	29	26.36	100.00
			Bontoborusu	89	89	0	22	24.72	100.00
			Kel. Bontobangun	99	99	0	17	17.17	100.00
			Kahu-kahu	116	116	0	26	22.41	100.00
			Kalepadang	95	95	0	9	9.47	100.00
	Total			645	645	0	141	21.86	100.00
6	Bontosikuyu	Bontosikuyu	Patikarya	88	86	2	20	23.26	97.73
			Laiyolo	84	81	3	16	19.75	96.43
			Laiyolo Baru	49	46	3	9	19.57	93.88
			Harapan	142	139	3	34	24.46	97.89

			Patilereng	64	62	2	26	41.94	96.88
	Total			427	414	13	105	25.36	96.96
	Bontosikuyu	Lowa	Lowa	69	62	7	9	14.52	89.86
			Appatanah	65	57	8	12	21.05	87.69
			Binanga Sombaiya	78	69	9	14	20.29	88.46
			Lantibongan	89	80	9	24	30.00	89.89
			Bahuluang	20	18	2	4	22.22	90.00
			Tambolongan	73	64	9	8	12.50	87.67
			Polassi	83	74	9	15	20.27	89.16
	Total			477	424	53	86	20.28	88.89
7	Pasimasunggu	Ujung Jamepa	Ujung	46	46	0	8	17.39	100.00
	Timur		Lembang Baji	72	70	2	12	17.14	97.22
			Bontomalling	113	111	2	39	35.14	98.23
			Bontobulaeng	98	97	1	36	37.11	98.98
			Bontojati	70	67	3	18	26.87	95.71
			Bontobaru	62	61	1	18	29.51	98.39
	Total			461	452	9	131	28.98	98.05
8	Pasimasunggu	Benteng Jamepa	Labuang Pamajang	91	78	13	8	10.26	85.71
			Ma'minasa	66	58	8	13	22.41	87.88
			Kembangragi	195	149	46	22	14.77	76.41
			Massungke	94	81	13	22	27.16	86.17
			Teluk Kampe	68	55	13	13	23.64	80.88
			Bontosaiile	64	58	6	8	13.79	90.63
			Tanamalala	54	43	11	8	18.60	79.63
	Total			632	522	110	94	18.01	82.59
9	Takabonerate	Pasitallu	Pasitallu	55	52	3	18	34.62	94.55
			Kayuadi	100	59	41	27	45.76	59.00
			Batang	102	81	21	28	34.57	79.41
			Nyiur Indah	120	58	62	29	50.00	48.33
			Rajuni	64	58	6	3	5.17	90.63
			Latondue	29	28	1	6	21.43	96.55
			Jinato	43	38	5	6	15.79	13.95
			Tambuna	50	44	6	4	9.09	88.00
			Tarupa	53	37	16	7	18.92	69.81
	Total			616	455	161	128	28.13	73.86
10	Pasimarannu	Pasimarannu	Bonerate	107	99	8	6	6.06	92.52
			Komba-komba	60	32	28	1	3.13	53.33
			Sambali	100	88	12	8	9.09	88.00
			Lambego	71	52	19	4	7.69	73.24
			Lamantu	118	101	17	9	8.91	85.59
			Bonea	94	73	21	8	10.96	77.66
			Majapahit	146	130	16	5	3.85	89.04
			Batu Bingkung	140	125	15	4	3.20	89.29
	Total			836	700	136	45	6.43	83.73
11	Pasilambena	Pasilambena	Kalaotoa	83	69	14	16	23.19	83.13
			Karumpa	45	40	5	0	0.00	88.89
			Garaupa	61	54	7	0	0.00	88.52
			Garaupa Raya	34	34	0	0	0.00	100.00
			Lembang Matene	66	48	18	15	31.25	72.73
			Pulo Madu	55	39	16	4	10.26	70.91
	Total			344	284	60	35	12.32	82.56
	TOTAL KABUPATEN			8164	7319	845	1358	18.55	89.65